



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310  
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374  
[www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)

---

Nomor : B-13177/P.01/DL.03.02/07/2023 Jakarta, 13 Juli 2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : 5 (lima) berkas  
Hal : Pemanggilan Calon Peserta Pelatihan  
Fungsional Perencana Ahli Pertama Tahun 2023

Yth.

1. Kepala Biro Kepegawaian/Sumber Daya Manusia Kementerian/Lembaga
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Menindaklanjuti surat kami Nomor B-06347/P.01/DL.03.01/03/2023 tanggal 12 April 2023 perihal Penawaran Program Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama, bersama ini disampaikan bahwa Staf Saudara, sebagaimana daftar terlampir, telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama akan dilaksanakan secara daring pada 7 Agustus 2023 hingga 22 September 2023 oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala.
2. Selama pelaksanaan Program Pelatihan Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas tersebut, peserta diwajibkan untuk selalu menyalakan video selama proses pelatihan berlangsung dengan tingkat kehadiran minimal 90 persen. Satu sesi = 2 jam pelajaran (jampel), dengan masing-masing jampel berdurasi 45 menit
3. Pemberian sertifikat kelulusan kepada peserta harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a). Memenuhi tingkat kehadiran sebagaimana disebutkan pada poin 2; b). Memenuhi nilai minimum evaluasi pembelajaran (kuis, *post-test*, presentasi, penugasan lainnya baik secara individu maupun berkelompok), serta telah mengisi seluruh kuesioner dari Pusbindiklatren dan penyelenggara pelatihan; dan c). Mengikuti seluruh program pelatihan dengan baik dan dinyatakan memenuhi minimum kehadiran yang ditentukan. Dalam hal peserta gagal memenuhi persyaratan dalam poin a dan b, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan sertifikat keikutsertaan dalam pelatihan
4. Pembiayaan Program Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2023 melalui mekanisme *cost sharing*. Pusbindiklatren menanggung *tuition fee*, tunjangan paket data dan komunikasi, biaya bahan, biaya sewa ruang meeting virtual serta biaya pengawas sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pelatihan Pusbindiklatren Bappenas. Sedangkan Instansi asal peserta menanggung biaya lain yang tidak ditanggung oleh Pusbindiklatren untuk menunjang pelaksanaan pelatihan.

5. Seluruh...

5. Seluruh calon peserta diwajibkan untuk mengunggah Surat Tugas dan Surat Pernyataan Kesiapan (format terlampir), **selambat-lambatnya pada tanggal 17 Juli 2023** melalui <http://sipena.bappenas.go.id>. Informasi panduan penggunaan aplikasi SIPENA dapat diakses melalui tautan <https://link.bappenas.go.id/panduan-sipena>.
6. Berkaitan dengan hal tersebut, mohon Saudara dapat menyampaikan informasi dan menerbitkan Surat Tugas untuk yang bersangkutan. Informasi lebih lanjut perihal pelaksanaan pelatihan secara bauran, dapat menghubungi Sdr. Naila Sukma Aisya melalui email [pusbindiklatren@bappenas.go.id](mailto:pusbindiklatren@bappenas.go.id) atau Sdr. Fitriyani (CP FEB Unsyiah) di nomor 08113152231

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala;
3. PPK Program PPN X, Kementerian PPN/Bappenas.



Lampiran 1 : Daftar Tujuan  
Nomor : B-13177/P.01/DL.03.02/07/2023  
Tanggal : 13 Juli 2023

#### DAFTAR TUJUAN

1. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
2. Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
3. Kementerian Perdagangan;
4. Kementerian Perdagangan;
5. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
6. Kementerian Perhubungan;
7. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
8. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
9. Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
10. Pemerintah Kabupaten Solok;
11. Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
12. Pemerintah Kota Palu;
13. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
14. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Lampiran 2 : Hak dan Kewajiban Peserta  
Nomor : B-13177/P.01/DL.03.02/07/2023  
Tanggal : 13 Juli 2023

### **HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA**

Kewajiban dan tugas dari peserta pelatihan adalah sebagai berikut:

- a. menyediakan dokumen pendukung pertanggungjawaban pengeluaran (jika dibutuhkan);
- b. menyiapkan alat pendukung untuk mengikuti pelaksanaan pelatihan;
- c. mengikuti seluruh rangkaian agenda pelaksanaan program pelatihan sesuai dengan ketentuan;
- d. mengikuti pelatihan dengan minimal tingkat kehadiran sesuai ketentuan, yakni minimal 90 persen dari jumlah jam pelajaran;
- e. dalam hal berhalangan atau perlu meninggalkan kegiatan pelatihan karena kepentingan pribadi yang mendesak, peserta wajib mendapatkan izin dari pelaksana pelatihan;
- f. menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti semua biaya yang dikeluarkan oleh Pusbindiklatren apabila tidak mengikuti ketentuan yang berlaku selama pelatihan;
- g. mengisi kuesioner pelaksanaan pelatihan yang ditentukan oleh Pusbindiklatren;
- h. menyampaikan/mengunggah surat tugas dan surat kesediaan mengikuti pelatihan (Lampiran 4);

Adapun hak dari peserta pelatihan adalah sebagai berikut:

- a. mendapatkan pelatihan sesuai kurikulum;
- b. mendapatkan bahan pelatihan;
- c. mendapatkan akun dan akses ke dalam Sipena;
- d. mendapat dokumen kelulusan/penyelesaian pelatihan sesuai dengan ketentuan tiap-tiap pelatihan

Lampiran 3 : Hak dan Kewajiban Instansi  
Nomor : B-13177/P.01/DL.03.02/07/2023  
Tanggal : 13 Juli 2023

### **HAK DAN KEWAJIBAN INSTANSI PESERTA PELATIHAN**

Kewajiban dan tugas dari instansi pengirim peserta pelatihan adalah sebagai berikut:

- a. memberikan dukungan kelengkapan dokumen administrasi pelatihan yang disyaratkan Pusbindiklatren dan atau pelaksana pelatihan; serta
- b. memberikan dukungan pembiayaan (*co-funding*) sesuai dengan kebutuhan dengan merujuk kepada Surat Edaran (SE) Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembiayaan Bersama (*cost sharing*) Dalam Penyelenggaraan Program Beasiswa Kementerian PPN/Bappenas.

Adapun hak dari instansi pengirim peserta pelatihan adalah sebagai berikut

- a. mendapatkan peserta yang telah memiliki kompetensi di bidang perencanaan sesuai dengan jenjangnya untuk Pelatihan Fungsional Perencana;
- b. mendapatkan informasi terkait pelaksanaan pelatihan dari Pusbindiklatren dan/atau pelaksana pelatihan.

Lampiran 4 : Surat Kesediaan Peserta  
Nomor : B-13177/P.01/DL.03.02/07/2023  
Tanggal : 13 Juli 2023

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PESERTA PROGRAM PELATIHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Alamat Kantor : .....  
Telp : .....email resmi kantor (\*\*.go.id).....  
No Handphone : .....email pribadi (\*\*\*.com).....  
Pelatihan : .....  
Pelaksana Pelatihan : .....

Menyatakan bahwa:

1. Bersedia untuk mengikuti Beasiswa Program Pelatihan Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2023. Apabila saya **mengundurkan diri setelah batas waktu** yang ditetapkan dalam surat pemanggilan, saya bersedia mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pusbindiklatren dalam pelaksanaan Beasiswa Program Pelatihan Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2023.
2. Bersedia mengikuti seluruh proses pelatihan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan Pusbindiklatren Bappenas dan Pelaksana Pelatihan, termasuk tidak melaksanakan pekerjaan rutin di kantor selama pelatihan berlangsung.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Pimpinan Instansi (Minimal Eselon II)

Yang Berjanji,

(Cap Basah stempel)

(Tanda tangan dan Meterai 10.000)

(.....)  
NIP.

(.....)  
NIP.

Lampiran 5 : Daftar Nama Peserta

Nomor : B-13177/P.01/DL.03.02/07/2023

Tanggal : 13 Juli 2023

### DAFTAR PESERTA PELATIHAN FUNGSIONAL PERENCANA AHLI PERTAMA TAHUN 2023

NO	NAMA	NIP	INSTANSI	UNIT KERJA	KOTA/KAB	PROV
1	Arieyani Widyarti Indrakusuma	198803262020122007	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Bappeda	Kota Semarang	JATENG
2	Aris Sutopo	199010232020121005	Pemerintah Kabupaten Wonogiri	Bappeda dan Litbang	Kabupaten Wonogiri	JATENG
3	Dias Aprilia Lindarni	199204152020122011	Pemerintah Kabupaten Purbalingga	Bappelitbangda	Kabupaten Purbalingga	JATENG
4	Endah Kartika	198509282020122001	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh	Kota Banda Aceh	ACEH
5	Estinna Sarie	199408022020122014	Kementerian Perhubungan	Balai Pengujian Perkeretaapian	Kota Bekasi	JABAR
6	Fastri Prisma Grizmaldy	199502272020122020	Pemerintah Kabupaten Solok	Bapelitbang	Kabupaten Solok	SUMBAR
7	Fatimah Rahmatya Gita Isjwara	199210122022022001	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Kota Jakarta Pusat	DKI
8	Fredy Linggom Pangihutan	199502252020121001	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Direktorat Pencegahan	Kabupaten Bogor	JABAR

NO	NAMA	NIP	INSTANSI	UNIT KERJA	KOTA/KAB	PROV
9	Harmita Morgan	199003062020122005	Kementerian Perhubungan	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Kabupaten Langkat	SUMUT
10	I Ketut Wibawa Bagianadi	199607072020121010	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	Bappeda	Kabupaten Mamuju	SULBAR
11	Insani Dwi Arlin	199801182020122005	Pemerintah Kabupaten Solok	Bapelitbang	Kabupaten Solok	SUMBAR
12	Ketut Josua Heningpraja Sarias	199012052022021001	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan	Kota Jakarta Selatan	DKI
13	Mhd Reza Fahlevy	199706232022021001	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan	Kota Jakarta Selatan	DKI
14	Muhammad Rasyid Ridha	199808062022021001	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Kelautan dan Perikanan	Kota Jakarta Pusat	DKI
15	Mustika Dyah Indraswari,	199312142020122019	Kementerian Perdagangan	Sekretariat Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional	Kota Jakarta Pusat	DKI
16	Nabilah Zuhairah	199601202022022001	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan	Kota Jakarta Pusat	DKI
17	Nur Faizah	198507312019082001	Pemerintah Kota Palu	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Palu	SULTENG
18	Priyambudi Hari Putranto	199509012022021001	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan		
19	Romadji Arianda	199509252020121014	Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir	Bappeda	Kabupaten Ogan Ilir	SUMSEL



NO	NAMA	NIP	INSTANSI	UNIT KERJA	KOTA/KAB	PROV
20	Safira Mayasti Nurrahmani	199402122022022002	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Dit. Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Kota Jakarta Selatan	DKI
21	Sari Kusumaningsih	199805292022022001	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Ketenagakerjaan	Kota Jakarta Selatan	DKI
22	Siti Nidia Isnin	198909042019032003	Pemerintah Kabupaten Aceh Timur	Bappeda	Kabupaten Aceh Timur	ACEH
23	Tiara Nabiilah Sadikin	199409222022022001	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Dit. Peren. dan Pengem. Proyek Infr. Nasional	Kota Jakarta Pusat	DKI
24	Tsalatsatin Husnaifi	198510122020122009	Kementerian Perdagangan	Setditjen Perundingan Perdagangan Internasional	Kota Jakarta Pusat	DKI
25	Wisnu Saputro	198605072020121001	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Biro Umum	Kota Jakarta Pusat	DKI